

ABSTRAK

Keberadaan Notaris di Indonesia tidak terlepas dari Lembaga Hukum Notaris yang mengaturnya. Peran utama Notaris di Indonesia adalah mengatur secara hukum tertulis dengan menuangkan kehendak para kliennya ke dalam akta otentik, terhadap hubungan-hubungan hukum para pihak yang meminta jasanya, maka dapat dikatakan bahwa fungsinya memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bidang hukum publik. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pembatalan akta notaris yang dapat dibatalkan menurut hukum di Kota Surabaya. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi hukum terhadap pembatalan akta notaris di Kota Surabaya.

. Metode yang digunakan peneliti adalah Yuridis Sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Notaris di Kabupaten Indramayu dan Kota Surabaya. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pelaksanaan Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum di Kota Surabaya adalah pembatalan akta notaris dapat terjadi karena beberapa hal tidak terpenuhinya syarat objektif; ketidakcakapan absolut; ketidakcakapan bertindak; ketidakcakapan relatif; bertentangan dengan undang-undang; ketertiban umum atau kesusilaan; terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal; adanya cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan; wanprestasi sebagai syarat batal; tidak terpenuhinya perjanjian formil. Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris di Kota Surabaya yaitu akta notaris yang dibatalkan, akta notaris yang dapat dibatalkan, dan akta notaris batal demi hukum. 1) akta notaris yang dapat dibatalkan merupakan akta yang dibatalkan oleh para penghadap sendiri dengan akta notaris berdasarkan alasan yang diketahui oleh para penghadap sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan. Notaris hanya dapat membuat akta pembatalan atas kehendak para penghadap sendiri, 2) akta notaris yang dapat dibatalkan karena penghadap tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian yaitu sepakat dan cakap, akta notaris dalam kualifikasi dapat dibatalkan akan tetap mengikat para pegghadap yang bersangkutan selama tidak ada yang mengajukan pembatalan ke Pengadilan, 3) akta notaris yang batal demi hukum karena syarat materiil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Implikasi hukumnya yaitu batal demi hukum, karena obyeknya tidak jelas atau tidak ada dan dapat dibatalkan karena tidak sepakat dan cakap yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Pembatalan, Akta Notaris

ABSTRACT

The existence of a Notary in Indonesia cannot be separated from the Notary Legal Institution that regulates it. The main role of a notary in Indonesia is to regulate legally in writing by pouring the will of his clients into an authentic deed, on the legal relations of the parties requesting his services, it can be said that his function is to provide legal services to the general public in the field of civil law, which includes in the field of public law. The purpose of this study is to analyze and explain the implementation of the cancellation of a notarial deed which can be canceled by law in the city of Surabaya. To analyze and explain the legal implications of the cancellation of a notarial deed in the city of Surabaya.

The method used by the researcher is Sociological Juridical and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with Notaries in Indramayu Regency and Surabaya City. And secondary data were obtained from literature studies related to the theory of legal responsibility and the theory of legal certainty.

Based on the results of the research that the implementation of the cancellation of a notarial deed which can be canceled according to the law in the city of Surabaya, the cancellation of a notary deed can occur due to several things that do not fulfill the objective requirements; absolute incompetence; inability to act; relative incompetence; contrary to the law; public order or decency; fulfillment of legal events in the agreement on the condition that it is void; a defect of will; abuse of circumstances; default as a condition of cancellation; non-fulfillment of formal agreements. Legal Implications for Cancellation of Notary Deeds in the City of Surabaya, namely canceled notary deed, revoked notary deed, and null and void notary deed. 1) a notarial deed that can be canceled is a deed that is canceled by the appearers themselves with a notarial deed based on reasons known to the presenters themselves or based on a court decision for the reasons mentioned in the legal considerations of the relevant decision. The notary can only make a deed of cancellation at the will of the appearers themselves, 2) a notarial deed that can be canceled because the appearers do not meet the subjective requirements of the validity of the agreement, namely agreed and competent, the notarial deed in qualification can be canceled will remain binding on the parties concerned as long as no one submits it. cancellation to the Court, 3) a notarial deed which is null and void because the material requirements are not fulfilled or do not meet the objective requirements for the validity of the agreement, namely a certain subject matter and a lawful cause. The legal implication is that it is null and void because the object is not clear or does not exist and can be canceled due to disagreement and competence as stated in Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Legal Implications, Cancellation, Notary Deed